

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021**



**KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan “ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah “ (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Karanganyar.

Selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kecamatan Karanganyar dalam Tahun Anggaran 2021.

Dengan melakukan pengukuran kinerja, maka Kecamatan Karanganyar dapat mengetahui sampai sejauh mana dalam pencapaian kinerja yang diharapkan. Dengan adanya Evaluasi Kinerja, maka akan diperoleh umpan balik sebagai bahan perbaikan kinerja di masa mendatang sehingga tercapai sasaran sesuai visi dan misi.

Selanjutnya kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 yang kami susun ini bermanfaat bagi Instansi Kantor Kecamatan Karanganyar, dan terlebih lagi bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Karanganyar.

Karanganyar, Januari 2022
CAMAT KARANGANYAR

BAGUS TRI SARJONO, S.T.P, M.Si
Pembina
NIP. 19650412 198811 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan..... | 1 |
| 1.3 Dasar Hukum..... | 2 |
| 1.4 Gambaran Umum Dinas/Badan..... | 3 |
| 1.5 Sistematika Pelaporan..... | 7 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN STRATEGIS | |
| 2.1. Rencana Strategis | 8 |
| 2.2 Rencana Kinerja Tahunan | 8 |
| 2.3 Ringkasan Perjanjian Kinerja..... | 11 |
| 2.4 Rencana Anggaran..... | 12 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1 Skala Pengukuran..... | 15 |
| 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangda..... | 15 |
| 3.3 Pengukuran Kinerja..... | 16 |
| 3.4 Realisasi Anggaran..... | 18 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 26 |
| B. Saran..... | 26 |
| | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD | |
| 2. Cascading IKU | |
| 3. Rencana Aksi | |
| 4. Pengukuran Kinerja | |
| 5. Perjanjian Kinerja | |
| 6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) | |
| 7. Lain- lain yang dianggap perlu | |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

Camat berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugasnya tersebut kepada Bupati Karanganyar sebagaimana Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 130/I/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Dalam Rangka memenuhi kewajiban tersebut disusunlah “ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 ” untuk melihat hasil-hasil yang telah dicapai berupa keberhasilan / kegagalan sebagai laporan kepada atasannya/pemberi wewenang dalam kurun waktu tersebut.

Pengukuran pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dapat menggunakan perhitungan sesuai formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Secara umum, Pemerintahan Kecamatan Karanganyar tidak menjumpai kendala yang berarti, hal ini ditunjukkan oleh capaian Kinerja yang rata-rata mencapai 100%. Isu-isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Pemerintahan Kecamatan Karanganyar antara lain adalah Lokasi Kantor Kecamatan Karanganyar yang akan dialihkan di Kelurahan Bejen akan berimbas pada awal – awal nantinya di lokasi yang baru pelayanan pada masyarakat kurang maksimal. Untuk itu mengantisipasi hal tersebut perlu dari sekarang diadakan sosialisasi lokasi kantor yang berpindah tersebut.

BAB I

PENDAHULUAAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Laporan ini merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimana setiap instansi memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan atas pencapaian target target kinerja yang telah ditetapkan.

Kecamatan Karanganyar merupakan salah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.dan sebagai dasar tugas pokok fungsi Camat sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan pengawas pada Sekretariat Daerah,Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Inspektorat,Kecamatan dan Staf Ahli Bupati

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam pasal 3 ayat (2) huruf w Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 12 Tahun 2009 diatur bahwa Camat membuat Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, dan berdasarkan Instruksi Bupati Karanganyar Nomor: 130/I/Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka setiap akhir tahun anggaran mulai Tahun Anggaran 2002 Camat wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan kepada Bupati Karanganyar.

Sebagai perwujudan akuntabilitas tersebut, dalam laporan ini akan diuraikan beberapa hal mengenai pelaksanaan berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Karanganyar.

1.3 DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat berdasarkan Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD Tahun 1945
3. Landasan Struktural : Undang – undang No. 22 Tahun 1999
4. Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.
 - c. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (3).

1.4 GAMBARAN UMUM DINAS/BADAN

Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkedudukan di pusat Ibu Kota Kabupaten dengan 12 kelurahannya yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Adapun susunan organisasi Kecamatan sebagaimana diatur dalam bagian kedua pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 terdiri dari :

1. Camat, Sekretariat, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketrentaman dan Ketertiban , Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dibantu oleh 2 Sub bagian yaitu Sub bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Masing-masing Seksi dipimpin Seorang Kepala Seksi Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Tugas pokok dan fungsi Camat sebagaimana diatur dalam Bab III Bagian Pertama pasal 3 Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 dan juga diatur dalam Bab III Bagian Kesatu Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 pada pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

Selanjutnya pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas pokok, maka kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembinaan Pemerintahan Kelurahan, Ketrentaman dan ketertiban, Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan Umum.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan Umum.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi antara lain :

a. Sekretariat :

1. Peningkatan Pelayanan Teknis Administrasi kepada seluruh Organisasi Kecamatan
2. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan
3. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
4. Peningkatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Peralatan barang inventaris dan perlengkapan

b. Seksi Tata Pemerintahan :

1. Peningkatan kinerja pemerintahan kelurahan dalam menangani administrasi pemerintahan Kelurahan dan penyusunan Perdes / APPK
2. Memantapkan terbentuknya lembaga kelurahan dan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya
3. Memadukan dan mensinkronisasikan tugas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Instansi Pemerintah
4. Peningkatan ketrampilan perangkat kelurahan
5. Peningkatan kinerja bagi Bendaharawan Kelurahan dan Sekretaris BPD
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan KTP dan KK

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat:

1. Pemantapan perencanaan pembangunan kelurahan
2. Peningkatan efektifitas penggunaan dana pembangunan kelurahan
3. Peningkatan prakasa serta swadaya masyarakat dalam pembangunan
4. Pengembangan potensi penunjang pariwisata
5. Peningkatan tertib pembagian air dan pemanfaatannya

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menangani penyakit sosial dilingkungan
2. Peningkatan kewaspadaan terhadap bencana alam

e. Seksi Kesejahteraan Sosial :

1. Peningkatan kepedulian warga masyarakat terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya
2. Peningkatan peran serta lembaga kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam menangani penyakit sosial
3. Peningkatan mutu gizi makanan bagi keluarga dan sarana kesehatan masyarakat

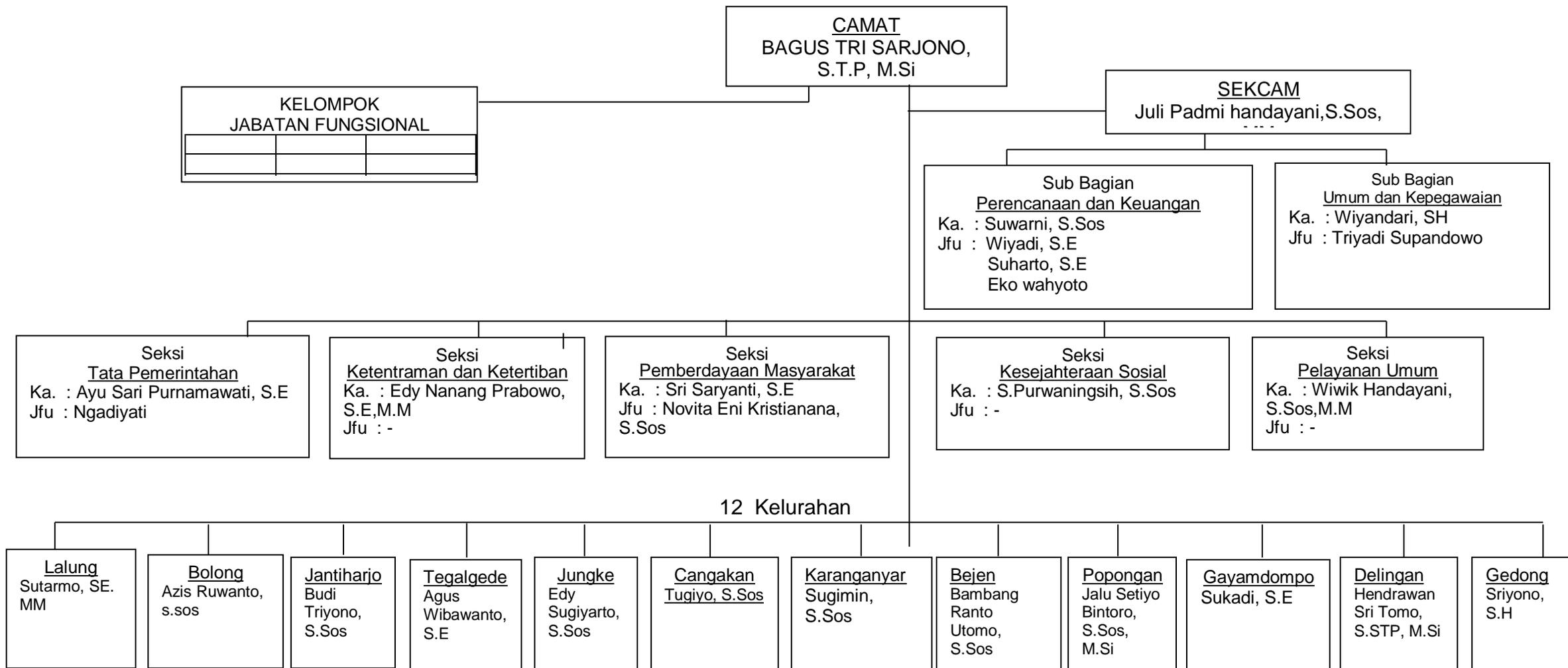
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kehidupan beragama, olah raga, pendidikan dan kebudayaan

f. Seksi Pelayanan Umum :

1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan pemukiman yang bersih, indah dan serasi
2. Peningkatan pelayanan masyarakat dalam mencari legalisasi surat keterangan
3. Peningkatan kelancaran pelaksanaan rapat dan upacara serta protokoler
4. Peningkatan kebersihan, keindahan, pertamanan serta pengelolaan sarana dan prasarana umum

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGANYAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR



1.5 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Karanganyar

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanganyar, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Karanganyar yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Karanganyar

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Permasalahan |
|-----|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Belum optimalnya pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan. | a. terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya. c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur. d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan | 1. Seksi Tata Pemerintahan a. kurangnya kualitas SDM aparatur Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan kelurahan; d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan kelurahan; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap Infrastruktur Kelurahan |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Permasalahan |
|-----|---------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | <p data-bbox="683 239 894 271">penganggaran</p> <p data-bbox="643 289 1013 488">f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan.</p> <p data-bbox="643 513 1013 650">g. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;</p> <p data-bbox="643 675 1013 812">h. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan</p> | <p data-bbox="1029 513 1433 600">2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p data-bbox="1065 625 1433 712">a. belum optimalnya sosialisasi Perda;</p> <p data-bbox="1065 737 1433 874">b. belum optimalnya pembinaan Linmas desa;</p> <p data-bbox="1065 899 1433 1148">c. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);</p> <p data-bbox="1029 1173 1433 1260">3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat</p> <p data-bbox="1065 1285 1433 1535">a. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah;</p> <p data-bbox="1065 1559 1433 1921">b. masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;</p> <p data-bbox="1065 1946 1433 2195">c. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan</p> |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Permasalahan |
|-----|---------------|---------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | <p>pembangunan.</p> <p>4. Seksi Kesejahteraan Sosial</p> <p>a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial:</p> <p>b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin.</p> <p>c. masih tingginya tingkat pengangguran;</p> <p>d. kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.</p> <p>5. Seksi Pelayanan Umum</p> <p>a. Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat</p> <p>b. Terbatasnya sarana dan prasarana.</p> <p>c. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;.</p> <p>d. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.</p> |

1.6 SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD Kecamatan Karanganyar /Sistematika pelaporan LKjIP Kecamatan Karanganyar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Gambaran Umum Dinas/Badan, Sistematika Pelaporan.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

Meliputi Rencana Rencana Kinerja Tahunan, Ringkasan Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Skala Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat, Pengukuran Kinerja, Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Meliputi, Rekomendasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Karanganyar tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi:

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Misi:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat .
3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis.
4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan.
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

Tabel 2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Karanganyar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| No | Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD | Permasalahan Pelayanan Kecamatan | Faktor | |
|----|---|--|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | <p>Misi Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga</p> <p>Tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>Sasaran Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas</p> | Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur perlu ditingkatkan. | Kurangnya pemahaman tugas dan fungsi (tusi). | Motivasi kerja dan penetapan standar pelayanan publik. |

Rencana strategis merupakan penjabaran atas visi misi dalam bentuk yang lebih operasional dan terarah untuk kurun waktu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran strategik Kecamatan Karanganyar dibuat dengan mengacu pada Rencana Strategis Kabupaten Karanganyar.

Sesuai dengan bidang tugas kecamatan yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan, Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Karanganyar telah dirumuskan sebagai berikut :

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Karanganyar dan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), kebijakan dan program. Dijelaskan dalam tabel berikut dibawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karanganyar Tahun 2018-2023

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Sasaran | | | | | Target Akhir Renstra |
|-----|--|---|---------------------------|--------|--------------|------------------------|------|------|------|------|----------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan | | Nilai SAKIP | Skor | NA | NA | 65 | 67 | 69 | 70 | 70 |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | IKM | Skor | NA | NA | 70 | 72 | 74 | 75 | 75 |

2.2 RINGKASAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut dibutuhkan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang jelas dan realistis serta memungkinkan untuk diukur tingkat keberhasilannya. Perencanaan tersebut telah disusun dalam Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2021.

Rencana Kerja Tahunan adalah merupakan rencana program kegiatan beserta indikator indikator kinerja setiap tahun yang disusun berdasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBD.

Program Kegiatan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari beberapa kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari beberapa kegiatan:
 - Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Pengembangan Wilayah Kelurahan

3.1 RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA

RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KECAMATAN KARANGANYAR

| Tujuan/Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Target |
|--------------------------|--|-------------------|--------|
| Tujuan | | | |
| | Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan | Nilai SAKIP | 67 |
| Sasaran | | | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | IKM | 72 |

Anggaran Kecamatan Karanganyar Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

| Program | | Anggaran |
|---------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp.1.888.734.900,00 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Rp. 64.000.000,00 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 11.922.000.100,00 |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 25.000.000,00 |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 50.480.000,00 |
| 6 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. 2.123.000.000,00 |
| | JUMLAH | Rp.16.073.215.000,00 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah manifestasi pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Karanganyar yang memuat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanganyar Tahun 2021 menyajikan capaian kinerja kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Karanganyar yang dikelola berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Karanganyar Tahun 2021 dan Anggaran Perubahan Tahun 2021.

Pertanggungjawaban atas keberhasilan / kegagalan melaksanakan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ini disampaikan kepada pemberi delegasi, wewenang dan mandat, selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat yang perlu dilakukan secara periodik. Hal tersebut akhirnya akan lebih meningkatkan kapasitas Instansi Pemerintah untuk pmenyelenggarakan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan secara baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3.1 SKALA PENGUKURAN

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi Perangkat Daerah. Kecamatan Karanganyar melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2021.

Berikut dirumuskan cara pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

a. Target Realisasi Positif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Target Realisasi Negatif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala **pengukuran ordinal**, yaitu dengan menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
|-----------|------------------------------|-----------------|
| 1 | Lebih dari 100% | Sangat Baik |
| 2 | 75 – 100% | Baik |
| 3 | 55 – 74 % | Cukup |
| 4 | Kurang dari 55 % | Kurang |

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGDA

Pencapaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan dan tingkat capaian sasaran yang bersifat absolute, Pengukuran kinerja dimulai dengan pengukuran Indikator kinerja yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil(outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Namun karena berbagai keterbatasan dalam laporan ini focus perhatian hanya akan menilai sampai pada Indikator hasil (outcome).

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karanganyar

| NO | TUJUAN/ SASARAN | | INDIKATOR KINERJA OUTPUT TAHUN 2021 | | CAPAIAN | | | KINERJA % |
|----|--------------------|--|---|--------|---------|-------|-------|--------------|
| | | | URAIAN | TARGET | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Tujuan | | | | | | | |
| | | Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan | Nilai SAKIP | 67 | 67,53 | 69,76 | NA | NA |
| | Sasaran | | | | | | | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | IKM | 72 | 76,54 | 79,28 | 85,02 | 118,09% |

3.3 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja OPD Kecamatan Karanganyar Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja tujuan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) pada tahun 2021 belum dapat tersaji karena nilai SAKIP tahun 2021 baru akan dievaluasi pada tahun 2022 oleh tim evaluator Inspektorat Daerah.

Sedangkan untuk realisasi indikator kinerja tujuan nilai SAKIP pada tahun 2020 menunjukkan sebesar 69,76 Apabila realisasi capaian tahun 2020 dibandingkan dengan target tahun 2021, maka sudah melampaui target. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir tahun renstra tahun 2023 sebesar 70, capaian tahun 2020 sudah sangat sangat mendekati target.

Upaya yang dilakukan Kecamatan Karanganyar guna meningkatkan capaian nilai SAKIP antara lain melalui program/kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan dan Pembangunan Kewilayahan
- b. Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
- c. Wilayah Tertib Perda
- d. Sarpras Wilayah Dalam Kondisi Baik
- e. Peran Serta warga masyarakat dalam kehadiran musrenbang

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP antara lain belum adanya kesesuaian antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. Oleh karena itu, Kecamatan Karanganyar terus berupaya untuk menyelaraskan antar dokumen tersebut dengan tujuan agar SAKIP tidak hanya menjadi formalitas laporan, melainkan menjadi system yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

2. Capaian kinerja indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan capaian sebesar 118,09% atau kategori **Sangat Baik**. Yaitu dari target IKM 72 terealisasi 85,02. Capaian IKM ini juga meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 79,28. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun renstra tahun 2023, maka capaian tahun 2021 sudah melampaui target tahun 2021 yaitu sebesar 72. Hal ini menunjukkan gambaran tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Karanganyar.

Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Karanganyar guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat antara lain melalui program/ kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan nilai komponen IKM yang diperoleh, Sarana dan prasarana dan Penanganan Pengaduan masih perlu mendapatkan perhatian ekstra. Oleh karena itu, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, melalui kegiatan pengadaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik akan lebih ditingkatkan guna meningkatkan capaian IKM. Sedangkan untuk penanganan pengaduan akan ditindaklanjuti melalui upaya memperjelas alur/mekanisme pengaduan, media/kanal pengaduan serta mengintensifkan petugas pengelola pengaduan agar aduan dari masyarakat dapat segera tertangani dengan baik.

Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran, program kegiatan penunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

**TABEL 4.0 Capaian serapan anggaran Kecamatan Karanganyar
Tahun Anggaran 2020 dan 2021**

| No | PROGRAM DAN KEGIATAN | PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN PERMEN 90 | Input Tahun 2020 | | % | Input Tahun 2021 | | % |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Target | Realisasi | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 1,499,615,000 | 1,472,313,879 | 98,13 |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.816.757.000 | 1.816.757.000 | 100 | 1,499,615,000 | 1,472,313,879 | 98,13 |
| | Belanja Pegawai | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.816.757.000 | 1.816.757.000 | 100 | 1,499,615,000 | 1472313879 | 98,13 |
| 2 | Belanja Langsung | | 24.839.031.000 | 24.735.589.951 | 99,58 | | | |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1.825.780.500 | 1.782.446.278 | 97,62 | 389,119,900 | 381,127,781 | 97,94 |
| | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 132,380,100 | 127,446,328 | 96,27 |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 736.842.300 | 736.842.300 | 100 | 80,880,000 | 80880000 | 100 |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 221.731.000 | 184.605.743 | 83,26 | 36,600,000 | 31719828 | 86,67 |
| | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 424.123.200 | 422.923.000 | 99,72 | | | |
| | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 | 14,900,100 | 14846500 | 99,64 |
| | Penyediaan alat tulis kantor | | 157.295.800 | 157.263.800 | 99,98 | | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 27,180,150 | 27,174,521 | 99,97 |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 71.888.000 | 71.871.350 | 99,98 | 18,200,150 | 18194521 | 99,97 |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 36.620.200 | 36.619.885 | 100 | 7,000,000 | 7000000 | 100 |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.000.000 | 19.805.000 | 99,03 | 1,980,000 | 1980000 | 100 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|----------------|----------------|-------|-------------|-------------|-------|
| | Penyediaan makanan dan minuman | fasilitasi Kunjungan tamu | 58.230.000 | 56.175.000 | 96,47 | - | | |
| | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 114,240,000 | 114,240,000 | 100 |
| | Penyediaan jasa Keamanan Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 70.800.000 | 70.800.000 | 100 | 114,240,000 | 114240000 | 100 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 14,000,000 | 11,030,000 | 78,79 |
| | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 23.250.000 | 20.540.000 | 88,34 | 14,000,000 | 11030000 | 78,79 |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 1.575.658.500 | 1.533.137.223 | 97,30 | 45,175,000 | 45,175,000 | 100 |
| | Pembangunan Gedung kantor | | 790.770.000 | 754.540.640 | 95,42 | | | |
| | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 9.744.500 | 9.744.500 | 100 | | | |
| | Pengadaan peralatan gedung kantor | | 93.555.000 | 93.555.000 | 100 | | | |
| | Pengadaan Mebeler | Pengadaan Mebel | 130.100.000 | 129.950.000 | 99,88 | 21,000,000 | 21000000 | 100 |
| | Pengadaan Komputer | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 104.744.000 | 104.700.000 | 99,96 | 24,175,000 | 24175000 | 100 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 158.280.500 | 157.070.408 | 99,24 | | | |
| | | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 26,542,200 | 26,459,482 | 99,68 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50.808.000 | 47.773.975 | 94,03 | 14,334,000 | 14251282 | 99,42 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 21.050.000 | 21.050.000 | 100 | | | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | | 3.200.000 | 2.973.200 | 92,91 | | | |
| | Pemeliharaan Komputer | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 33.410.000 | 33.410.000 | 100 | 7,197,000 | 7197000 | 100 |
| | Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 18.106.500 | 18.106.500 | 100 | | | |
| | Penataan halaman kantor | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 157.000.000 | 156.180.000 | 99,48 | 5,011,200 | 5011200 | 100 |
| | Fasilitas pemindahan Gedung kantor | | 4.890.000 | 4.083.000 | 83,50 | | | |
| III. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 10.075.000 | 10.075.000 | 100 | 10,125,000 | 10,125,000 | 100 |
| | Pengadaan Pakaian Olahraga | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 6.075.000 | 6.075.000 | 100 | 10,125,000 | 10125000 | 100 |
| | Pengadaan Pakaian Khusus hari2 tertentu | | 4.000.000 | 4.000.000 | 100 | | | |
| IV. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.000.000 | 16.000.000 | 100 | 19,477,450 | 19,477,450 | 100 |
| | Penyusunan RKA/DPA | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.000.000 | 6.000.000 | 100 | 14,477,450 | 14477450 | 100 |
| | Penyusunan Renstra | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 | 5,000,000 | 5000000 | 100 |
| V. | Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK | 21.411.517.000 | 21.393.931.450 | 99,91 | 64,000,000 | 63,600,000 | 99,33 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|-------------|-------|----------------|----------------|-------|
| | Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 62.025.000 | 62.025.000 | 100 | 60,000,000 | 59,600,000 | 99,33 |
| | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 60,000,000 | 59600000 | 99,33 |
| | | Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang berada di kecamatan | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 100 |
| | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 4,000,000 | 4000000 | 100 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | 100 |
| | | koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | 100 |
| | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 25,000,000 | 25000000 | 100 |
| | Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 255.573.500 | 254.573.500 | 99,61 | 50,480,000 | 47,480,000 | 94.05 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 50,480,000 | 47,480,000 | 94.05 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara | | | | 3,000,000 | | |
| | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | 10,000,000 | 10000000 | 100 |
| | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | 5,080,000 | 5080000 | 100 |
| | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 32,400,000 | 32400000 | 100 |
| | Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | PROGRAM PEMBERDAYAAN MAASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 151.028.500 | 149.278.500 | 98,84 | 11,922,000,100 | 11,922,000,100 | 100 |
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 12,000,100 | 12,000,100 | 100 |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 12,000,100 | 12000100 | 100 |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | 11,910,000,000 | 11,910,000,000 | 100 |
| | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah pembangunan di desa | | | | | | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 12,000,000 | 12000000 | 100 |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | 11,890,000,000 | 11890000000 | 100 |
| | | Evaluasi Kelurahan | | | | 8,000,000 | 8000000 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | |
| | Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan | PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 2.752.890.000 | 2.752.515.000 | 99,99 | 2,123,000,000 | 2,123,000,000 | 100 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 2,123,000,000 | 2,123,000,000 | 100 |
| | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 2,123,000,000 | 2123000000 | 100 |
| | Pengembangan wilayah Kelurahan | | 18.190.000.000 | 18.175.539.450 | 99,92 | 16,073,215,000 | 16,034,521,760 | 99,76 |

Adapun anggaran yang dikelola pada Tahun 2021 Kecamatan Karanganyar sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------|----------|------------------------------|
| 1. Belanja Tidak langsung | : | Rp. 1.499.615.000,00 |
| 2. Belanja Langsung | : | |
| a. Belanja Rutin | : | Rp. 345.567.450,00 |
| b. Belanja Kegiatan | : | Rp. 2.313.957.550,00 |
| c. Belanja Modal | : | Rp. 11.914.175.000,00 |
| JUMLAH ANGGARAN | : | Rp. 16.073.215.000,00 |

3.4 REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu sumberdaya penting untuk menopang terselenggaranya pemerintahan. Aspek keuangan yang dilaksanakan dan harus dipertanggungjawabkan oleh Unit Kerja Kecamatan Karanganyar tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Karanganyar Tahun 2021. Anggaran Kinerja di Kecamatan Karanganyar dilaksanakan berdasarkan Kepmendagri 13 tahun 2006, anggaran pada unit kerja Kecamatan Karanganyar telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan agar Laporan Kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2021 dapat menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pengambil kebijakan melalui interpretasi yang tepat atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan secara lebih mendalam. Analisis ini meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan visi, misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Selanjutnya uraian dari pencapaian kinerja masing masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

| NO | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|----|--|---------------|----------------|-------|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1.888.734.900 | 1.807.266.660 | 98,13 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.477.450 | 19.477.450 | 100 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.477.450 | 14.477.450 | 100 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.499.615.000 | 1.472.313.879 | 98,18 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.499.615.000 | 1.472.313.879 | 98,18 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 10.125.000 | 10.125.000 | 100 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 10.125.000 | 10.125.000 | 100 |
| 4 | Administrasi Umum | 8.980.000 | 8.980.000 | 100 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi | 7.000.000 | 7.000.000 | 100 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14.900.100 | 14.846.500 | 99,64 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 18.200.150 | 18.194.521 | 99,97 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 14.000.000 | 11.030.000 | 78,79 |
| 5 | Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 43.175.000 | 43.175.000 | 100 |
| | Pengadaan Mebel | 21.000.000 | 21.000.000 | 100 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin | 24.175.000 | 24.175.000 | 100 |

| | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|-------|
| | Lainnya | | | |
| 7 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 80.880.000 | 80.880.000 | 100 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 36.600.000 | 31.719.828 | 86,67 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14.900.100 | 14.846.500 | 99,64 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 114.240.000 | 114.240.000 | 100 |
| 8 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang | 26.541.200 | 26.459.482 | 99,69 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 14.334.000 | 14.251.282 | 99,42 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.197.000 | 7.197.000 | 100 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.011.200 | 5.011.200 | 100 |
| II | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK | 64.000.000 | 63.600.000 | 99,38 |
| 1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 59.600.000 | 99,33 |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 60.000.000 | 59.600.000 | 99,33 |
| 2 | Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | 4.000.000 | 4.000.000 | 100 |
| | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4.000.000 | 4.000.000 | 100 |
| III | PROGRAM PEMBERDAYAAN MAASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 11.922.000.100 | 11.922.000.100 | 100 |
| 1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 12.000.100 | 12.000.100 | 100 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12.000.100 | 12.000.100 | 100 |
| 2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 11.910.000.000 | 11.910.000.000 | 100 |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12.000.000 | 12.000.000 | 100 |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 11.890.000.000 | 11.890.000.000 | 100 |
| | Evaluasi Kelurahan | 8.000.000 | 8.000.000 | 100 |
| IV | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 |

| | | | | |
|----|---|---------------|---------------|-------|
| | UMUM | | | |
| 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 |
| | Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 |
| V | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.480.000 | 47.480.000 | 94,06 |
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 50.480.000 | 47.480.000 | 94,06 |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 5.080.000 | 5.080.000 | 100 |
| | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 32.400.000 | 32.400.000 | 100 |
| VI | PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 2.123.000.000 | 2.123.000.000 | 100 |
| 1 | Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 2.123.000.000 | 2.123.000.000 | 100 |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 2.123.000.000 | 2.123.000.000 | 100 |

Secara umum, kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Karanganyar telah sesuai dengan target, namun semua itu belum dapat menggambarkan keberhasilan tugas, hal ini disebabkan banyaknya tugas dan fungsi yang tertuang dalam kegiatan tidak terbiayai dari APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban Camat selaku OPD (Organisasi Perangkat Daerah) adalah dengan menyusun LKjIP, yang berguna untuk menjelaskan tingkat keberhasilan dan kendala dalam setiap program kegiatan.
2. Program/kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2021 sudah dapat dilaksanakan secara menggembirakan hasilnya hal ini dikarenakan faktor kepemimpinan dan perencanaan tim di Kantor Kecamatan Karanganyar.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Skill) pada Kantor Kecamatan Karanganyar dan Kantor Kelurahan se-kecamatan Karanganyar menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas sangat perlu diupayakan peningkatannya demi kelancaran pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Program.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Karanganyar telah berhasil dalam melaksanakan dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2021 sebagian berikut:

1. Pengukuran rata-rata Capaian Kinerja seluruh Sasaran Strategis Kecamatan Karanganyar Tahun 2021 sebesar 118,09% (Sangat Baik)
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Karanganyar 118,09% (Sangat Baik)

Dalam mencapai Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Karanganyar hampir tidak permasalahan yang cukup berat, namun kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Karanganyar harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber sumber daya maupun prasarannya. Khususnya pada Tahun 2021 karena terjadi refofusing anggaran sehingga pemangkasan anggaran berakibat sulitnya melakukan efisiensi anggaran karena anggaran yang sangat minim.

B. Saran

Saran yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Karanganyar di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk penunjang operasional kegiatan baik di kecamatan maupun Kantor Kelurahan. Sarana dan prasarana tersebut yang masih sangat dibutuhkan adalah sepeda motor, dan perbaikan Kantor Camat dan fasilitas penunjang khususnya lingkungan Kantor Camat Karanganyar;
2. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
3. Bimbingan teknis secara Intensif dalam bidang Perencanaan dan Keuangan (Akuntansi Keuangan) sangat diharapkan dari Tingkat Kabupaten Kepada Tim Keuangan di tingkat kecamatan dan kelurahan yang menjadi OPD tersendiri.
4. Perlunya Pelatihan tentang penguasaan komputer dan Informasi Teknologi (IT) untuk peningkatan SDM baik di kecamatan maupun di kelurahan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanganyar Tahun 2021 yang telah kami susun, dan kami menyadari masih ada kekurangsempurnaan dalam penyusunannya. Oleh karena itu kekurangan yang ada akan diupayakan perbaikan pada masa yang akan datang.

Karanganyar, Januari 2022



CAMAT KARANGANYAR

[Handwritten Signature]

BAGUS TRI SARJONO, S.T.P, M.Si
Pembina
NIP. 19650412 198811 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN KARANGANYAR

Alamat Jl. Lawu Karanganyar Telp. (0271) 495030
Website – E-mail : karanganyar@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57711

Karanganyar, Januari 2022

Kepada :

Yth. Bupati Karanganyar
Up. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar
di -
KARANGANYAR

SURAT PENGANTAR

Nomor:900/ .9/1/2022

| No | Jenis yang dikirim | Banyaknya | Keterangan |
|----|---|-----------|---|
| 1. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. | 1 Bendel | Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. |

CAMAT KARANGANYAR

BAGUS TRI SARJONO, S.T.P, M.Si.

Pembina

NIP. 19650412 198811 1 001

LAMPIRAN

